

**UPAYA INDONESIA AIDS COALITIONS DALAM MERESPONS
TARGET 90-90-90 UNTUK ORANG DENGAN HIV/AIDS DI INDONESIA
TAHUN 2011-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NABILLA NUR RISTY BASIR

19323096

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**UPAYA INDONESIA AIDS COALITIONS DALAM MERESPONS
TARGET 90-90-90 UNTUK ORANG DENGAN HIV/AIDS DI INDONESIA
TAHUN 2011-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NABILLA NUR RISTY BASIR

19323096

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Indonesia AIDS Coalitions dalam Merespons Target 90-90-90 untuk
Orang dengan HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

10 Agustus 2023

البعثة الإسلامية الأندونيسية

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Masitoh Nur Rohma
Hadza Min Fadhli Robby
Enggar Furi Herdianto

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

10 Agustus 2023,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'AEBCKAKX547196814'.

Nabilla Nur Risty Basir

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>15</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	16

BAB II GARIS SEJARAH DAN KOMUNITAS PEMERHATI HIV/AIDS DI	
INDONESIA	17
2.1 Perjalanan Historis HIV/AIDS di Indonesia	17
2.1.1 <i>Kondisi dan Situasi HIV/AIDS di Indonesia sebelum Pandemi</i>	17
2.1.2 <i>Kondisi dan Situasi HIV/AIDS di Indonesia setelah Pandemi</i>	18
2.2 Perjalanan Historis Koalisi LSM	20
2.2.1 <i>Perjalanan Historis Terbentuknya IAC</i>	20
2.2.2 <i>Visi dan Misi IAC</i>	22
2.3 ARV dalam Pemenuhan Target 90-90-90	22
2.3.1 <i>Ketersediaan ARV di Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19</i>	22
2.3.2 <i>Ketersediaan ARV di Indonesia Saat Pandemi Covid-19</i>	23
2.3.3 <i>Efisiensi ARV dalam Menekan Virus HIV pada Target 90-90-90</i>	24
BAB III UPAYA INDONESIA AIDS COALITIONS DALAM MERESPONS	
TARGET 90-90-90	30
3.1 Koalisi yang dibentuk oleh NGO di Indonesia	30
3.2 Proses Lobi Indonesia AIDS Coalitions	34
3.3 Proses Kampanye Indonesia AIDS Coalitions	41
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Indonesia	3
Gambar 1.2 Indikator Pencapaian Target 90-90-90 Tahun 2018	24
Gambar 1.3 Indikator Pencapaian Target 90-90-90 Tahun 2022	25
Gambar 1.4 Kampanye ODHA Berhak Sehat	43
Gambar 1.5 Kampanye ODHA Berhak Sehat Twitter	44
Gambar 1.6 Kampanye ODHA Berhak Sehat Instagram	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aktor, Substansi, dan Hasil Lobi	33
Tabel 2 Indikator <i>NGO Coalitions</i> dan Implementasinya	48

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
ARV	: Antiretroviral
COVID-19	: Corona Virus 19
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IAC	: <i>Indonesia AIDS Coalitions</i>
IMS	: Infeksi Menular Seksual
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KEMENKES	: Kementerian Kesehatan
KPAN	: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OBS	: ODHA Berhak Sehat
ODHA	: Orang dengan AIDS
ODHIV	: Orang dengan HIV
PPH-PUK2IS	: Pusat Penelitian HIV/AIDS Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial
P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
SIHA	: Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS
SUFA	: <i>Strategic use of ARV</i>
UNAIDS	: <i>United Nations Programme on HIV and AIDS</i>

ABSTRAK

HIV/AIDS sebagai salah satu epidemi yang saat ini juga menjadi tantangan global, karena epidemi HIV/AIDS ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Melalui target 90-90-90 yang merupakan salah satu target untuk menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia diharapkan dapat membantu menanggulangi epidemi tersebut. Namun, saat pandemi COVID-19 di Indonesia mulai muncul, nampaknya epidemi HIV/AIDS ini menjadi target yang tidak diprioritaskan. Penulis akan meneliti upaya *NGO Coalitions* dalam merespons Target 90-90-90 saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Indonesia AIDS Coalitions* yang dalam hal ini berperan sebagai koalisi NGO merespons kasus ini melalui tiga upaya yaitu dengan proses yang dilakukan dalam pembangunan koalisi antar LSM, melakukan lobi dengan proses yang dilakukan saat melobi melibatkan aktor-aktor atau target yang ingin dipengaruhi, serta melakukan kampanye untuk menyebarkan isu serta edukasi yang tepat terkait permasalahan HIV/AIDS di Indonesia.

Kata Kunci: HIV, AIDS, *NGO Coalitions*, Lobi, Kampanye, Indonesia AIDS

Coalitions

ABSTRACT

HIV/AIDS as one of the current epidemics is also a global challenge, because the HIV/AIDS epidemic has spread to all corners of the world. It is hoped that the 90-90-90 target, which is one of the targets for tackling HIV/AIDS in Indonesia, will help tackle the epidemic. However, when the COVID-19 pandemic in Indonesia began to emerge, it seemed that the HIV/AIDS epidemic was becoming a non-prioritized target. The author will examine the efforts of the NGO Coalitions in responding to the 90-90-90 Target during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The Indonesia AIDS Coalitions, which in this case acted as a coalition of NGOs, responded to this case through three efforts, namely through a process carried out in building coalitions between NGOs, conducting lobbying with the process carried out when lobbying involving actors or targets they wished to influence, and carrying out campaigns to spread issues related to the HIV/AIDS problem in Indonesia.

Key Words: HIV, AIDS, *NGO Coalitions*, Lobby, Campaign, Indonesia AIDS Coalitions.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Epidemi HIV/AIDS saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu isu yang menjadi tantangan global. Dalam hal ini, isu yang terdapat dalam cakupan hubungan internasional tidak terbatas pada isu ekonomi, politik, serta militer. Namun, isu terkait permasalahan kesehatan seperti epidemi dan pandemi juga menjadi topik bahasan dalam hubungan internasional. Epidemi HIV/AIDS merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi topik bahasan yang tak kunjung usai dalam hubungan internasional karena sudah menjadi epidemi di seluruh dunia.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dapat dikatakan sebagai sekumpulan gejala atau penyakit yang penyebabnya dari virus yang sering disebut *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Virus tersebut dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia, hal ini yang kemudian mengakibatkan virus HIV menyerang sel darah putih dan akhirnya daya tahan tubuh ODHIV maupun ODHA terganggu, akibatnya adalah orang dengan HIV menjadi mudah mengalami infeksi penyakit dan akhirnya meninggal karena mudah terkena penyakit penyerta lain (Handayani 2017).

Berdasarkan laporan kasus *United Nations Programme on HIV & AIDS* atau UNAIDS, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan kasus besar yang terjadi di beberapa negara seperti Thailand, India, dan Afrika. Tidak berhenti di beberapa negara tersebut, kasus ini juga dialami di beberapa negara lain

seperti Kamboja, Vietnam, Burma, Indonesia, Bangladesh, serta Indonesia yang merupakan negara-negara rawan kematian akibat HIV & AIDS (Najib 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia-Tenggara dengan jumlah kasus epidemi HIV/AIDS yang masih terus bertambah. Perlu diketahui bersama bahwa epidemi secara umum terkonsentrasi pada orang-orang yang termasuk ke dalam populasi kunci, yang dalam hal ini populasi kunci meliputi pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik (penasun), serta waria (Kemenkes 2019).

Target 90-90-90 merupakan target yang ditetapkan oleh *United Nations Programme on HIV & AIDS* (UNAIDS) pada tahun 2014 untuk membantu mengakhiri epidemi HIV/AIDS dengan target tercapainya pada tahun 2030. Target tersebut turut dilaksanakan oleh beberapa kawasan seperti Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Salah satunya yang berada di kawasan Asia adalah Indonesia. Dalam hal ini target yang dimaksud meliputi 90% ODHA dapat mengetahui statusnya bahwa mereka mengalami HIV, 90% ODHA yang mengetahui statusnya kemudian dapat mengakses atau mendapat pengobatan ARV, serta 90% ODHA on ARV supresi atau ODHA yang telah mengonsumsi ARV dapat menekan virus HIV dalam tubuhnya. (UNAIDS 2019).

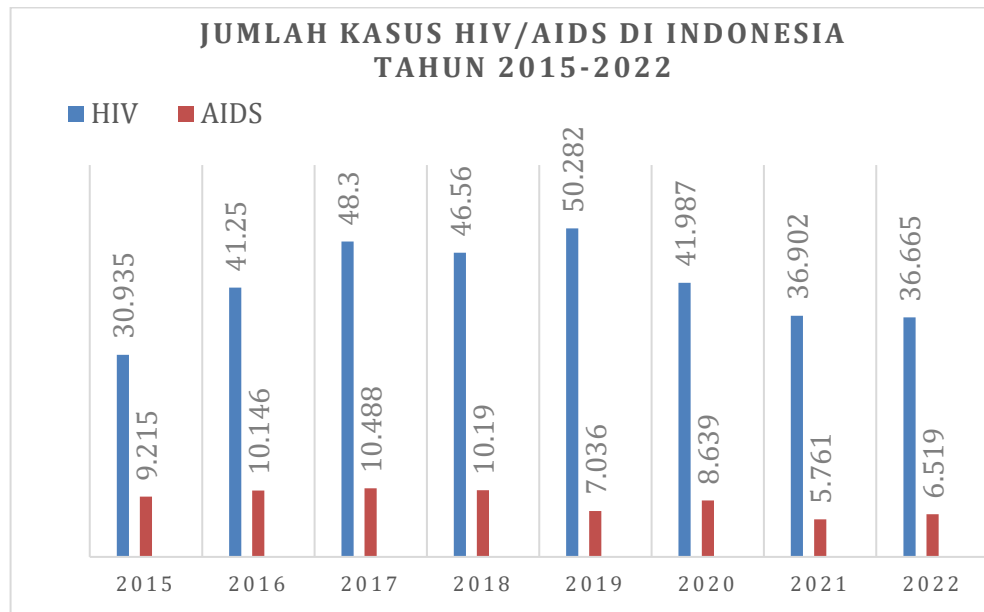
Hasil yang dicapai dari negara-negara di kawasan Asia pada tahun 2017 mencapai hasil yang baik. Diketahui bahwa Thailand serta Malaysia efektif dalam penerapan capaian target 90% sementara untuk Indonesia masih

berada di angka 35% yang mana menunjukkan angka capaian yang masih tergolong rendah (UNAIDS 2017).

Namun, di tengah-tengah pelaksanaan target tersebut, mulai muncul pandemi COVID-19, yang mana kasus COVID-19 ini seolah-olah mengesampingkan permasalahan yang juga tidak kalah pentingnya untuk segera ditangani yaitu epidemi HIV/AIDS di Indonesia (Handayani 2017).

Laporan *Global AIDS Update 2021* UNAIDS, memaparkan bahwasannya ODHIV memiliki kemungkinan yang lebih rentan dan memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terkena COVID-19, hal ini dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Melemahnya sistem kekebalan tubuh ODHIV dikarenakan CD4 yang terserang virus HIV. Hal ini yang akhirnya membuat virus COVID-19 lebih mudah masuk sebagai penyakit penyerta atau oportunistik. Selain itu, pandemi juga mempersulit mereka untuk mengakses layanan kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Selain itu, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI memaparkan bahwasannya dampak yang paling terasa adalah dampak terhadap pengobatan untuk HIV/AIDS. Kaitannya dengan kasus ini, ketersediaan antiretroviral memang merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh ODHIV. Namun, kenyataannya pada saat pandemi COVID-19 layanan terkait HIV/AIDS justru menurun, termasuk ketersediaan ARV yang terbatas (Purba 2020).

Gambar 1.1 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Indonesia



Sumber Data: SIHA Laporan KT Kasus HIV/AIDS 2015 – 2022

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tingkat HIV/AIDS yang cukup tinggi. Jumlah kasus HIV/AIDS aktif di Indonesia sebelum pandemi COVID 19 diketahui seperti grafik di atas dari data yang terdapat dalam Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV & AIDS dan IMS (SIHA), terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sementara jumlah HIV/AIDS positif di Indonesia selama pandemi COVID 19 berdasarkan laporan Ditjen Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI sampai dengan 2022 ditemukan sebanyak 36.665 mengalami HIV dan 6.519 kasus mengalami AIDS (Kemenkes 2022).

Hasil laporan yang didapatkan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwasannya ODHIV termasuk kategori yang lebih rentan terpapar virus COVID-19. Namun, diketahui kurang dari 3% ODHIV di kawasan Afrika Sub-Sahara yang menerima minimal satu dosis untuk vaksin

COVID-19 pada bulan Juli 2021, yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan dengan jumlah ODHIV tertinggi di dunia (WHO 2021).

Pada dasarnya vaksin COVID-19 merupakan salah satu perlindungan yang penting untuk ODHIV. Namun, masih banyak keraguan serta ketakutan yang didapatkan dari ketidaktepatan informasi, yang mana informasi tersebut berasal dari sumber yang kurang jelas, hal tersebut yang akhirnya membuat ODHIV enggan untuk melakukan vaksin COVID-19. Dalam mengatasi hal ini, tentu saja harus dilakukan upaya untuk memastikan bahwa para tenaga kesehatan, koalisi LSM, serta semua masyarakat dapat turut terlibat dalam melakukan kampanye untuk mengedukasi serta menyebarkan informasi yang tepat terkait vaksin COVID-19 untuk orang HIV (WHO 2021).

Hasil laporan dan data yang didapatkan dari UNAIDS, pada akhir tahun 2019 diketahui sejumlah 37,9 juta orang di dunia terinfeksi HIV dan 770 ribu diantaranya telah meninggal dunia karena AIDS. Dalam hal ini diketahui bahwa jumlah ODHIV yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan untuk HIV masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran dari masyarakat maupun LSM untuk dapat turut merespons dan berkontribusi dalam meningkatkan peran penting dengan tujuan utama untuk memberikan layanan dan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS melalui dukungan target 90-90-90 untuk mengatasi permasalahan tersebut (UNAIDS 2019).

Di masa pandemi COVID-19, penting adanya keterlibatan komunitas atau organisasi untuk aktif dalam merespons upaya penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia. Bukan hanya sebagai komunitas yang bekerja

meningkatkan kesadaran saja, namun diberi peran yang lebih besar untuk menjangkau para ODHIV yang kesulitan mendapatkan akses pengobatan ARV atau pencegahannya. Dalam mengatasi hal tersebut, *Indonesia AIDS Coalitions* (IAC) memiliki upaya dalam merespons hal tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi urgesi IAC sebagai LSM yang dibahas dalam penelitian. IAC yang merupakan koalisi LSM yang terbentuk dari perkumpulan individu dari beberapa LSM yang berbeda yang mana pada awalnya mereka juga mengalami secara langsung kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan publik. Maka dari itu, dalam merespons hal ini tentu saja mereka memiliki kepedulian terhadap isu-isu HIV/AIDS. IAC juga memiliki tujuan untuk mengupayakan perbaikan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya terkait HIV/AIDS. (Aditya 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya *Indonesia AIDS Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk orang dengan HIV/AIDS di Indonesia tahun 2011-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya IAC dalam merespons target 90-90-90 untuk ODHIV di Indonesia tahun 2011-2023.
2. Untuk mengetahui sejauh mana target 90-90-90 diterapkan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui garis sejarah dan komunitas pemerhati HIV/AIDS di Indonesia.
4. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh IAC.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah konsep *NGO Coalitions* terhadap orang dengan HIV & AIDS dengan studi kasus upaya IAC untuk merespons target 90-90-90 untuk orang dengan HIV/AIDS pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia Tahun 2011-2023.

Tahun yang dipilih dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2011 dipilih karena pada tahun tersebut IAC mulai didirikan, dalam hal ini peneliti melihat kondisi HIV/AIDS serta respons IAC di Indonesia dalam kurun waktu sebelum adanya pandemi COVID-19 sampai cakupan tahun dipilih hingga tahun 2023 karena pada tahun tersebut merupakan tahun diumumkannya secara resmi berakhirnya COVID-19 di Indonesia.

Sementara cakupan teori terbatas pada *NGO Coalitions* yang mana NGO nantinya berperan untuk memberikan respons mengenai target 90% ODHIV mengetahui bahwa mereka mengalami HIV positif, 90% ODHIV yang mengetahui bahwa statusnya adalah HIV positif dapat mengakses atau mendapat pengobatan ARV, serta 90% ODHIV dalam ARV supresi atau ODHIV yang telah mengonsumsi ARV dapat menekan virus HIV dalam tubuhnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam memperoleh landasan ilmiah untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang memiliki keterkaitan topik bahasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Rizka Ayu Setyani melakukan penelitian dengan judul “Dilematis Penanggulangan HIV/AIDS Selama Pandemi COVID-19: Akankah *Three Zero* 2030 Terwujud?”. Dalam penelitian ini Rizka memaparkan terkait bagaimana dampak pandemi COVID-19 yang kemudian dijadikan sebagai dasar atas perubahan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan pada sektor kesehatan. Salah satu kebijakan yang telah dibuat yaitu pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kebijakan ini diatur dalam Keputusan Presiden yaitu keputusan Nomor 7 Tahun 2020. Keputusan tersebut akhirnya disahkan pada tanggal 13 Maret 2020. Dalam penelitian ini, Rizka memaparkan terkait langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 tergolong sudah baik. Namun, akan lebih baik apabila penanggulangan yang dilakukan seimbang antara penanggulangan COVID-19 dan HIV/AIDS. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa HIV/AIDS juga merupakan isu global yang sama pentingnya. Pemerintah melakukan metode skrining dalam pemanfaatan teknologi informasi, metode ini dilakukan dalam upaya pemetaan kasus COVID-19. Metode menggunakan teknologi digital pun sebetulnya dapat digunakan dalam upaya untuk membantu program penanggulangan HIV/AIDS. Misalnya, penggunaan teknologi digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi serta edukasi terkait

HIV/AIDS, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendeteksi ada atau tidaknya HIV pada tubuh seseorang melalui skrining mandiri. Sebetulnya, telah dikembangkan aplikasi berbasis teknologi digital oleh IAC tepatnya pada tahun 2013, pada saat itu program ini dirancang atas Kerjasama antara IAC dengan Kementerian Kesehatan. Aplikasi yang diberi nama “AIDS Digital” ini memiliki fitur seperti layanan informasi terkait tes HIV, terapi ARV, kelompok sebaya yang mendukung ODHIV, pencegahan HIV, serta layanan terkait IMS. Namun, sangat disayangkan karena aplikasi “AIDS Digital” dengan alamat URL: www.aidsdigital.net. Tidak dapat diakses kembali. Padahal saat ini, semua kebutuhan dapat dikatakan serba digital (Setyani 2020).

Penelitian selanjutnya dengan judul “Peran UNAIDS di Indonesia terhadap Penanggulangan HIV/AIDS di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.” oleh Muhammad Akbar. Muhammad Akbar memaparkan terkait UNAIDS di masa pandemi juga terus memberikan advokasi terhadap perilaku diskriminasi dan stigmatisasi serta mendukung kesetaraan gender melalui kampanye ”Hari Nol Diskriminasi”, sosialisasi di beberapa instansi dalam menghapus stigma dan diskriminasi di tempat kerja, dan memperkuat kerangka hukum, serta membentuk respons terhadap perilaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai organisasi internasional yang berpengalaman menanggulangi pandemi, UNAIDS juga memberikan beberapa respons khusus dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Adapun upaya UNAIDS pada periode 2020-2021 dilakukan dengan cara membantu Indonesia dalam menanggulangi serta memperkecil jumlah

kasus HIV/AIDS pada masa pandemi COVID-19. Upaya ini telah mendorong progres terhadap pencegahan penularan infeksi baru HIV/AIDS dengan hasil penurunan tren penularan baru sebesar 43% dan jumlah per insiden mencapai 0.10 dari 1000 (Seribu) kasus. Hal ini juga berdampak dalam menyukseskan pencapaian strategi *Getting to Zero* dan tujuan global yaitu *Sustainable Development Goals* dalam mencapai *zero* HIV/AIDS pada tahun 2030. Dengan demikian konsep organisasi internasional mengkonfirmasi peran dan fungsi UNAIDS melalui implementasi *Getting to Zero* dalam upaya penanggulangan dan memperkecil jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia saat pandemi COVID-19 (Akbar 2022).

Penelitian selanjutnya adalah “Upaya *United Nations Programme On AIDS* (UNAIDS) dalam Mengakhiri Epidemii HIV/AIDS di Indonesia Melalui *Fast Track Strategy* Tahun 2015-2018” oleh Febby Regina Rista Manopo. Febby memaparkan terkait peran UNAIDS melalui program *Fast Track Strategy* di Indonesia dalam periode 2015-2018. Adapun beberapa *action programs* yang dilakukan sebagai upaya *fast track strategy* diantaranya melalui LKB (Layanan Komprehensif HIV dan IMS yang Berkesinambungan). Adapun beberapa kendala seperti tingginya stigma masyarakat, kurangnya distribusi ARV, dan tabunya informasi mengenai HIV/AIDS dan masalah kesehatan seksual menjadi penghambat program ini, sehingga hasil dari program ini masih dikatakan dalam status in efektivitas. Penelitian ini dirujuk untuk menganalisis program aksi UNAIDS di Indonesia melalui strategi yang dikeluarkan dalam pencegahan penularan HIV/AIDS (Manopo 2018).

Dari ketiga penelitian tersebut telah membahas terkait program penanggulangan HIV & AIDS. Namun, di sini penulis menemukan celah terkait belum adanya bahasan spesifik terkait *respons* Indonesia AIDS *Coalitions*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Helen Yanacopulus dalam konsepnya terkait *NGO Coalitions*, memaparkan terkait koalisi NGO pada dasarnya dapat membentuk kekuatan bersama. Konsep *NGO Coalitions* mencakup 3 hal, diantaranya yaitu:

1. Koalisi

Proses yang dilakukan dalam pembangunan koalisi antar LSM dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan kerja sama dengan melibatkan visi misi yang sejalan. Kedua, memiliki dorongan untuk melakukan kerja sama yang dalam hal ini bukan hanya reaksi defensif. Namun, juga strategi proaktif untuk mencapai tujuan bersama. LSM membentuk koalisi sebagai upaya untuk mempengaruhi serta turut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau pembuatan kebijakan (Yanacopulus 2005).

2. Lobi

Lobi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menegosiasikan suatu kepentingan, dalam hal ini proses yang dilakukan saat melobi melibatkan aktor-aktor atau target yang ingin dipengaruhi. Sementara kampanye berguna untuk memperoleh lebih banyak dukungan. Lobi dan kampanye tentu saja membutuhkan cara serta taktik yang berbeda. Melobi

merupakan proses yang jauh lebih memiliki target untuk mencapai kepentingan, dalam proses melobi dibutuhkan kemahiran dalam mempengaruhi atau persuasi, pengetahuan ahli, serta keterampilan negosiasi. Saat ini LSM tidak hanya melakukan proses lobi kepada pemerintah, namun juga non pemerintah. Karena itu, menjadi penting bagi para pelobi LSM untuk lebih memahami internal LSM itu sendiri (Yanacopulus 2005).

3. Kampanye

Kampanye berisi tentang pesan serta tujuan yang jelas, tujuan kampanye yaitu untuk menyebarkan informasi atau memperoleh pendukung dengan menggunakan media untuk mempengaruhi masyarakat atau pembuat keputusan, kampanye merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh koalisi. Kampanye memiliki tujuan yaitu untuk mempengaruhi kebijakan yang merupakan studi kasus atau permasalahan utama (Yanacopulu 2005).

Penelitian ini menggunakan tiga hal utama yang terdapat dalam konsep *NGO Coalitions* dari Helen Yanacopulus untuk kemudian mencoba menjawab rumusan masalah terkait bagaimana Indonesia AIDS *Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk ODHIV di Indonesia Tahun 2011-2023.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia AIDS *Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk orang dengan HIV & AIDS di

Indonesia Tahun 2011-2023 melalui konsep *NGO Coalitions* yang mencakup 3 hal sebagai berikut:

1. Koalisi

Terdapat koalisi LSM yang peduli terkait isu serta pengobatan HIV & AIDS di Indonesia yang mana ini berhubungan dengan dapat mendorong ketercapaian target 90-90-90. Dibentuknya Indonesia AIDS *Coalitions* atau koalisi AIDS Indonesia yang merupakan kumpulan dari LSM yang peduli terkait isu HIV/AIDS yang terdapat di Indonesia.

2. Lobi

Beberapa proses yang dilakukan oleh Indonesia AIDS *Coalitions* untuk melobi terkait dengan target 90-90-90 seperti pelayanan kesehatan tes HIV, peningkatan akses pengobatan ARV dan kepatuhan pengobatan HIV meliputi:

- a. Melakukan lobi kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak solusi untuk mengatasi permasalahan ODHA dan ODHIV di Indonesia dengan cara melakukan audiensi bersama Dirjen P2P.
- b. Melakukan lobi kepada pemerintah untuk memikirkan kembali rencana pengelolaan pasokan stok ARV di Indonesia. Dalam hal ini, IAC juga melakukan upaya untuk penurunan harga ARV di Indonesia.
- c. Melakukan lobi dengan membawakan kasus terkait kelangkaan ARV, adanya stigma, serta diskriminasi kepada ODHIV.
- d. Melakukan lobi untuk bekerja dalam memperkuat kapasitas LSM dan pemangku kepentingan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

3. Kampanye

Dalam hal ini, IAC bersama-sama melakukan kampanye melalui kampanye ODHA Berhak Sehat (OBS), tujuan utama dari kegiatan ini adalah kampanye terkait isu HIV lewat media sosial untuk meningkatkan pengetahuan mengenai HIV, menormalisasi tes HIV untuk mendorong capaian tes HIV, dan terutama mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHIV serta populasi kunci. Dalam hal ini dibagi menjadi dua strategi yaitu *downstream* dan *upstream strategy*. Strategi tersebut digunakan sebagai upaya IAC untuk memperoleh dukungan, menyebarkan informasi yang tepat terkait isu maupun persoalan tentang HIV/AIDS. IAC menggunakan berbagai *platform* media sosial sebagai sarana untuk kampanye. Dalam hal ini media sosial digunakan membantu menyelesaikan target 90-90-90 di Indonesia dengan membuat tagar #ODHABerkahSehat. Kampanye OBS menekankan pada peran strategis pengobatan sebagai pencegahan HIV dengan mengupayakan 90 persen ODHA mengetahui status HIV pada tubuhnya, 90% dari mereka kemudian memulai untuk melakukan pengobatan.

Implementasi teori untuk menjawab rumusan masalah *NGO Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk ODHIV di Indonesia Tahun 2011-2023 yaitu dengan melalui koalisi LSM, lobi, serta kampanye yang akhirnya dapat menaikkan target untuk mengetahui bahwa sudah lebih banyak orang yang mengetahui status HIV, sudah memiliki ketersediaan ARV yang cukup dan sudah konsumsi ARV,

karena apabila mereka telat konsumsi ARV maka akan berdampak pada kekebalan tubuh orang dengan HIV/AIDS.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam riset “Upaya IAC dalam Merespons Target 90-90-90 untuk Orang dengan HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2023” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data literasi dari jurnal, buku, maupun artikel terkait kasus HIV/AIDS.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian makro yang meliputi negara yaitu Indonesia dan subjek yang mengalami permasalahan yaitu ODHIV. Sementara objek penelitian meliputi sikap negara dan *NGO Coalitions*, yang dalam hal ini sikap Indonesia dan IAC dalam merespons target 90-90-90 di Indonesia dalam penanggulangan epidemi HIV & AIDS.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh yaitu melalui data sekunder, dalam hal ini berupa jurnal serta beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan mencari sumber informasi yang relevan mengenai respons IAC terhadap target 90-90-90 bagi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2011-2023. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan riset yang berhubungan dengan kasus

tersebut, dilanjutkan dengan mengerjakan proposal penelitian dan penulisan skripsi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Alur penulisan BAB pertama diawali latar belakang terkait masalah yang akan diteliti yaitu terkait epidemi HIV dan AIDS, dilanjutkan dengan Indonesia AIDS *Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk ODHIV, dilanjutkan tinjauan pustaka dari tiga penelitian berbeda dengan topik relevan diikuti celah baru yang akan diteliti, dilanjutkan kerangka pemikiran berupa teori yang diaplikasikan dalam menjawab kasus, dilanjutkan argumen sementara terkait jawaban awal rumusan masalah. Dilanjutkan dengan BAB kedua terkait pemaparan garis sejarah dan komunitas pemerhati HIV/AIDS dalam merespons target 90-90-90. Dilanjutkan dengan BAB ketiga terkait upaya IAC dalam merespons terbatasnya antiretroviral pada masa pandemi untuk orang dengan HIV & AIDS di Indonesia Tahun 2011-2023 dan aplikasi dari kerangka pemikiran dan pemaparan argumen pendukung. Dilanjutkan dengan BAB terakhir mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
GARIS SEJARAH DAN KOMUNITAS PEMERHATI HIV/AIDS
DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan terkait pengantar yang berupa uraian konteks pemaparan terkait perkembangan epidemi HIV/AIDS, garis sejarah dan keterlibatan komunitas pemerhati HIV/AIDS di Indonesia melalui peran IAC dalam kontribusinya terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta memuat data dan informasi yang penting atau dibutuhkan sebelum masuk pada bab analisis.

2.1 Perjalanan Historis HIV/AIDS di Indonesia

2.1.1 Kondisi dan Situasi HIV/AIDS di Indonesia sebelum Pandemi

Diketahui bahwa munculnya kasus HIV pertama kali yaitu di Bali pada tahun 1987. Diketahui jumlah kasus HIV berada di bawah 100 kasus pada kisaran tahun 1987. Kemudian, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun-tahun selanjutnya diketahui jumlah kasus HIV terus mengalami peningkatan. Penyebaran infeksi HIV/AIDS yang begitu cepat mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk sebuah lembaga penanggulangan HIV/AIDS yang disebut dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), yang bertanggung jawab atas berbagai program dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta bertanggung jawab atas perkembangan kebijakan. KPAN ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994. Setelah tahun 2000, jumlah kasus HIV melonjak hingga mencapai angka 732 kasus. Kabar baiknya, epidemi HIV ini mengalami penurunan pada tahun 2003. Namun, kembali mengalami

peningkatan di tahun-tahun berikutnya (Purwaningsih dan Widayatun 2008).

Sebelum pandemi COVID-19, khususnya tahun 1996-2003 yang disebut sebagai periode respon awal HIV/AIDS yang mana pada periode ini ditandai dengan semakin menyebarnya virus HIV ke beberapa daerah di Indonesia. Dalam menanggapi epidemi ini, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan khusus tingkat menteri pada tahun 2002 tentang rangkaian penanggulangan HIV/AIDS. Periode selanjutnya disebut sebagai periode respon lanjutan HIV/AIDS periode ini dimulai setelah tahun 2003. Pada periode ini jumlah kasus HIV/AIDS pun terus mengalami peningkatan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya jumlah kasus HIV & AIDS fluktuatif setiap tahun hingga tahun 2018 jumlah kasus HIV di Indonesia 46.560 dan AIDS sebanyak 10.190 (Kemenkes RI 2018).

2.1.2 Kondisi dan Situasi Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia saat Pandemi

Pada tahun 2019, tepatnya saat pandemi COVID-19 mulai muncul di Indonesia, yang menyebabkan jumlah lonjakan kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi dikarenakan permasalahan penanggulangan kasus HIV/AIDS. Catatan laporan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai data pada tahun 2019-2022, kisaran jumlah ODHIV di Indonesia berjumlah 500 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan pada saat muncul dan berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia, penanggulangan kasus HIV/AIDS cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh Indonesia

merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang juga cukup tinggi (Safutra 2020).

Data resmi mengenai HIV & AIDS yang didapatkan dari Dinas Kesehatan yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai puncak pada tahun 2019. Namun, kabar baiknya pada tahun berikutnya jumlah kasus semakin stabil, data tersebut dapat dilihat dari laporan dari jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan secara berkala setiap triwulan (Widyatun 2020).

Laporan yang didapatkan dari UNAIDS pun menunjukkan bahwa terdapat pengurangan jumlah orang yang menginisiasi ARV selama pandemic COVID-19 di Indonesia, jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan Mei 2019, yaitu terjadi penurunan sebanyak 43%. Hal ini terjadi karena semakin banyak tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang kemudian dialihkan untuk respons pandemi COVID-19. Kabar baiknya, masih banyak kelompok komunitas yang inisiatif untuk dapat melakukan kerja sama dengan layanan kesehatan untuk mengirimkan secara langsung ARV ke rumah pasien dan memastikan bahwa pasien tidak terputus pengobatannya (UNAIDS 2019).

Data UNAIDS terbaru menunjukkan bahwa jumlah pasien yang mengakses dan mendapatkan ARV sudah kembali setelah bulan Juli 2020. Dalam penanganan kasus ini, telah ditingkatkan upaya penanggulangan dan pengobatan HIV melalui tes dan pemberian ARV. Namun pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari target 90-90-90 khususnya pada cakupan pengobatan (UNAIDS 2020).

2.2 Perjalanan Historis Indonesia AIDS Coalitions

2.2.1 Perjalanan Historis Terbentuknya IAC

Indonesia AIDS Coalition (IAC) merupakan kumpulan LSM yang bekerja sama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan HIV/AIDS. *Indonesia AIDS Coalitions* didirikan pada tahun 2011 yang dibentuk oleh sekelompok aktivis sosial, pemberdayaan, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Latar belakang terbentuknya IAC atas dasar mereka sama-sama prihatin serta mengalami secara langsung kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan publik. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam menyuarakan dan membantu ODHIV untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Kondisi tersebut yang akhirnya membuat para aktivis sosial tergerak untuk mendirikan IAC.

Aktor yang terlibat dalam proses pendirian IAC yaitu Aditya Wardhana, beliau adalah *Founder* IAC yang juga merupakan aktivis yang berasal dari LSM Rumah Cemara, yang mana LSM ini memperjuangkan hak dan perlakuan yang sama bagi pecandu obat-obatan dan orang dengan HIV/AIDS. Sindi Putri merupakan *Advocacy and Policy* IAC yang berasal dari Solidarity Foundation LSM yang bergerak untuk kampanye, advokasi, edukasi dan sosialisasi penanggulangan AIDS, akses pengobatan, hak kesehatan dan hak perempuan. Serta Irwandy Widjaja sebagai *Community mobilization* di IAC sekaligus mewakili salah satu pihak yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan (IAC 2020).

Antar aktor pendiri IAC tentu saja memiliki visi dan misi serta tujuan yang sejalan, sehingga interaksi yang terbentuk antar aktor-aktor tersebut akhirnya dapat menjadikan IAC memiliki *power* yang lebih kuat dalam mencapai tujuannya secara bersama-sama.

Tujuan dibentuknya IAC yaitu berjuang untuk perbaikan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya terkait HIV/AIDS. Seiring dengan berjalannya waktu, IAC telah berkembang sehingga dapat turut mengajak serta mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kampanye dalam memenuhi hak dasar ODHIV maupun kelompok lain yang terkena dampak akibat HIV/ AIDS. IAC juga memiliki program dalam hal akses mendapat layanan kesehatan, pembiayaan, inovasi kampanye, bantuan hukum dan hak dasar bagi ODHIV, serta pelatihan internal komunitas (IAC 2013).

Sejak IAC berdiri, IAC telah melakukan kerjasama untuk turut mengendalikan epidemi HIV/AIDS dan menjamin hak-hak ODHIV yang harapannya mereka tidak lagi menerima stigma negatif maupun diskriminasi dari masyarakat. Selain itu, IAC juga melakukan advokasi maupun lobi dalam membantu kesulitan-kesulitan yang dialami ODHIV, IAC juga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait fakta-fakta HIV/AIDS. (IAC 2013). Mitra pendukung IAC saat ini sudah mencakup Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, the Ford Foundation, Asia Pacific Network for ODHA (APN+), HIVOS, dan UNAIDS (IAC 2020).

2.2.2 Visi dan Misi IAC

IAC memiliki visi yaitu untuk merealisasikan negara tanpa stigma dan diskriminasi, yang mana sekaligus dapat memenuhi hak dasar ODHIV dan ODHA maupun populasi yang terdampak HIV/AIDS lainnya, dilindungi dan dipenuhi. IAC secara khusus berusaha untuk dapat menjunjung hak dasar ODHIV, khususnya terkait hak kesehatan, pekerjaan, kehidupan, serta pendidikan yang layak untuk mereka (IAC 2013).

Misi IAC yaitu bekerja sama untuk populasi kunci serta untuk menjunjung pemenuhan hak dasar ODHIV. Selain itu juga untuk penciptaan lingkungan yang kondusif, dan untuk memberikan program AIDS yang bersifat partisipatif dan transparan (IAC 2013).

2.3 ARV dalam Pemenuhan Target 90-90-90

2.3.1 Ketersediaan ARV di Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19

ARV merupakan obat yang dapat digunakan sebagai salah satu terapi untuk memperlambat perkembangan virus HIV, dalam hal ini sistem kerja ARV dengan cara menekan atau mematikan sementara virus HIV, agar nantinya dapat mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4 pada manusia (Infodatin 2016).

Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Bio Med sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian serta Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa pemerintah Indonesia telah menjamin ketersediaan antiretroviral (ARV) untuk ODHA atau ODHIV sampai dengan tahun 2018 (Farmalkes 2018).

Dirjen Engko pun memaparkan terkait Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan ARV. Diketahui pada bulan Desember 2018, Kementerian Kesehatan pun mendapatkan hibah obat ARV jenis *fixed dose combination* yang berasal dari *Global Fund* dengan jumlah 222 ribu botol ARV dengan jumlah 30 tablet obat per botol (Farmalkes 2018).

2.3.2 *Ketersediaan ARV di Indonesia Saat Pandemi Covid-19*

Pada masa pandemi COVID-19, ODHIV merupakan kelompok yang rentan serta memiliki resiko yang tinggi terkena COVID-19 karena sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI memaparkan bahwasannya dampak yang paling terasa adalah dampak terhadap pengobatan untuk HIV/AIDS (Purba 2020).

Selama masa pandemi COVID-19, terjadi ketidakstabilan stok ARV pada bulan April 2019, ARV yang seharusnya diberikan secara langsung untuk jangka waktu satu hingga tiga bulan konsumsi diketahui mengalami penurunan dan ketidakstabilan jumlah stok pengobatan ARV, padahal ODHIV seharusnya mengonsumsi ARV setiap hari. Kaitannya dengan hal ini, COVID-19 mengganggu pengobatan ARV khususnya dalam hal mobilitas, dikarenakan *lockdown* COVID-19 (Purba 2020).

Diketahui bahwa 107 ribu pasien HIV & AIDS telah mendapat dan mengonsumsi ARV diantara 305 ribu jumlah keseluruhan. Namun, kekhawatiran dari masyarakat mulai muncul, kekhawatiran tersebut dikarenakan kekurangan ARV jenis *Fixed Dose Combination* yang mulai menipis selama pandemi COVID-19 (Purba 2020).

2.3.3 Efisiensi ARV dalam Menekan Virus HIV pada Target 90-90-90

Sebelum ditemukannya ARV, setiap negara membuat shelter untuk menampung orang dengan HIV. Shelter tersebut tersebar di beberapa negara seperti Amerika, Thailand, dan Eropa. Disediakkannya *shelter* pada saat itu karena belum tersedia ARV yang dapat menekan serta melemahkan virus HIV pada tubuh orang dengan HIV tersebut. Sejauh ini, ARV dapat dikatakan sebagai obat yang efektif dalam menekan virus HIV/AIDS dalam tubuh ODHIV. Proses kerja ARV adalah setelah ODHIV secara rutin konsumsi ARV dan jumlah viraloadnya nol, maka mereka tidak akan menularkan virus HIV kepada orang lain. Mereka dapat produktif bekerja dan berkeluarga seperti biasa, bahkan virus tersebut tidak akan menular kepada pasangan dan anaknya (Prismasiwi 2020).

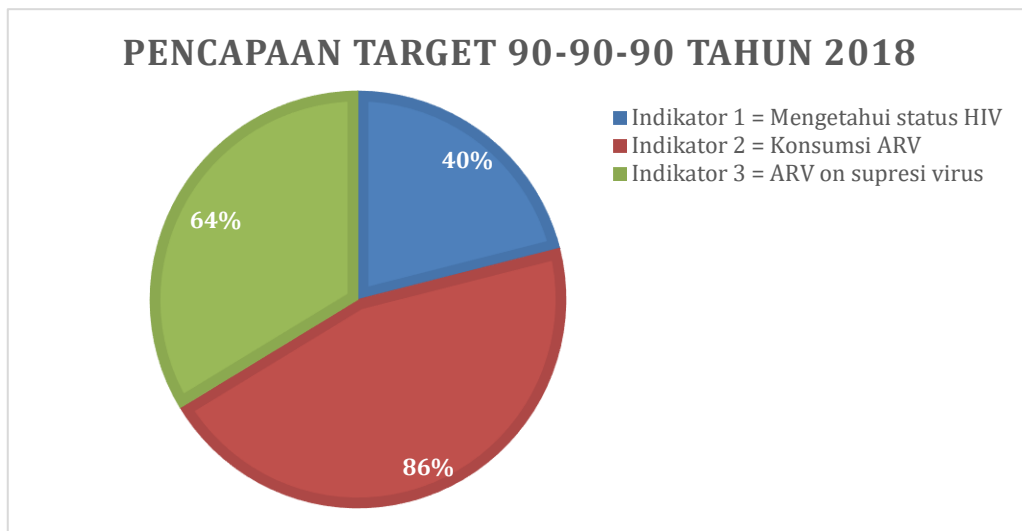
Setelah ditemukannya ARV diketahui bahwa kematian akibat HIV/AIDS menurun. Apabila seorang suami datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan didapatkan hasil positif, maka seorang istri pun harus melakukan tes HIV, sehingga apabila keduanya belum memiliki tanda-tanda infeksi oportunistik atau penyakit penyerta maka dapat segera diberikan ARV. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ODHIV yang mengikuti pengobatan ARV secara teratur tanpa tertinggal sekalipun dapat hidup seperti orang normal dan sehat pada umumnya. Berkat ARV, angka kematian HIV/AIDS menurun (Prismasiwi 2020).

ARV pertama kali dibuat pada 1997 dan pemerintah Indonesia mulai menyediakan ARV secara gratis pada akhir tahun 2014. Saat ini, dari

sebagian jumlah orang yang telah mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV, sekitar 120 ribu orang diantaranya telah mengonsumsi ARV secara teratur. Oleh sebab itu, Kemenkes bersama LSM dengan para tenaga kesehatan sangat dianjurkan untuk dapat mendeteksi. Setelah mendapatkan ARV dan mengonsumsi secara teratur, sehingga dapat menjadi ODHA yang produktif. Dari ODHA yang produktif diharapkan dapat memiliki penghasilan sendiri melalui usaha mandiri (Kemenkes 2019).

2.4 Indikator Pencapaian Target 90-90-90

Gambar 1.2 Indikator Pencapaian Target 90-90-90 Tahun 2018

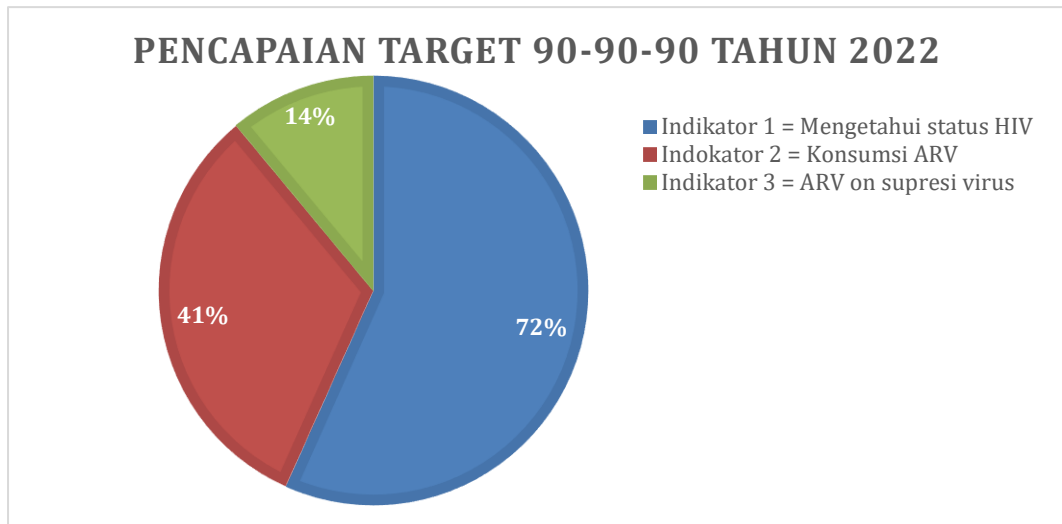


Sumber Data: SIHA Laporan KT, LBPHA, dan Laporan ARK 2018

Pencapaian target 90-90-90 tahun 2018 secara berurutan dari indikator 90 pertama, kedua dan ketiga adalah 40% kemudian 86% dan 64%. Menggunakan data tersebut diperkirakan Indonesia tidak akan mencapai target indikator cakupan ARV maupun viraload yang tersupresi pada akhir tahun 2020. Hal ini dikarenakan jumlah pencapaian indikator

pertama, yaitu jumlah orang yang telah terdeteksi HIV tergolong rendah, sehingga pada indikator kedua dan ketiga terkait ARV dan konsumsi rutinnya pun mengikuti (Kemenkes 2018).

Gambar 1.3 Indikator Pencapaian Target 90-90-90 Tahun 2022



Sumber Data: SIHA Laporan KT, LBPHA, dan Laporan ARK 2022

Penghitungan pencapaian target 90-90-90 dengan menggunakan cakupan pada Laporan Perkembangan Triwulan III 2022 dan penyesuaian persentase kumulatif ODHIV yang meninggal dari pemodelan epidemi HIV tahun 2020 memberikan indikator 90 pertama dan kedua menjadi 72% dan 41%. Sedangkan indikator 90 ketiga 14% (Kemenkes 2022).

Faktor yang menghambat upaya pencapaian target 90-90-90 yaitu pengetahuan, stigma, faktor risiko, serta masalah administrasi. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kualitas penjangkauan, konseling, serta pendampingan baik pada layanan oleh komunitas maupun oleh pemberi layanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk disini adalah *trust* atau

kepercayaan pada pemberi layanan yang perlu dibangun secara sistematis (Kemenkes 2022).

Faktor sistem pelayanan kesehatan yang menghambat upaya pencapaian 90-90-90 adalah fleksibilitas layanan baik dari sisi tempat, waktu, dan pelaksana. Kemudian persyaratan administrasi, ketidakpatuhan pada kebijakan nasional. Di sisi lain masalah suplai dan distribusi alat dan perbekalan kesehatan terkait tes dan pengobatan HIV masih menjadi masalah baik untuk tes, mempertahankan dalam pengobatan dan juga memonitor keberhasilan pengobatan.

Terakhir, koordinasi dan sinergitas yang belum baik di daerah karena masalah sumber pendanaan dan alur tanggung jawab. Faktor kebijakan yang menghambat upaya pencapaian 90-90-90 adalah kebijakan daerah desentralisasi yang kontra upaya penanggulangan dan cenderung membawa stigma dan diskriminasi komunitas terdampak. Kemudian kebijakan terkait ARV, serta komitmen untuk memonitor keberhasilan pengobatan yang dinilai masih rendah baik dari target program maupun komitmen pengadaan alat dan dukungan pembiayaan. Secara umum berhasil diidentifikasi masalah komitmen pemerintah dalam mengakselerasi inovasi strategis dalam pelayanan tes dan pengobatan HIV, kemudian koordinasi dan kolaborasi yang masih di atas kerjas dalam mendukung LKB-SUFA (Kemenkes 2022).

Alasan Indonesia belum mencapai target tersebut adalah karena beberapa alasan yang meliputi, Indonesia merupakan negara berkembang, secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait kesehatan

reproduksi serta pendanaan yang kurang dalam kerja sama baik bilateral atau multilateral, beberapa hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan virus HIV dengan cepat tersebar. Dari jumlah ODHIV yang mendapatkan pengobatan ARV dengan total 70% hanya 30% yang secara rutin dan berkelanjutan melakukan pengobatan ARV. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait HIV/AIDS serta tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV (Kemenkes 2019).

Penerapan PSBB dan *lockdown* menjadi penghambat ODHIV untuk dapat menjangkau layanan kesehatan atau bahkan LSM ketika ingin melakukan konsultasi atau memeriksakan kondisi mereka. Hal ini yang kemudian menjadi penghambat distribusi pasokan dan ketersediaan ARV di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia sendiri pun masih impor ARV dari luar negeri seperti India, Thailand, dan Amerika. Oleh sebab itu, stok ARV untuk ODHIV menipis. Selain itu, protokol COVID-19 yang cukup ketat juga menyebabkan masalah psikologis untuk ODHIV, dalam hal ini kecemasan karena COVID-19 mendorong kelompok tersebut berhenti atau malas untuk melanjutkan pengobatan (Prismasiwi 2020).

ODHIV rentan terinfeksi COVID-19, kaitannya dengan hal ini ketika ODHIV akan merasa cemas saat ingin mengakses layanan kesehatan karena takut terinfeksi atau tertular COVID-19 saat datang atau mengunjungi layanan kesehatan. Selain itu, beberapa layanan kesehatan pun tidak memberitahu terkait adanya konseling yang dilakukan secara daring (*online*) karena akses yang terbatas. Adanya *lockdown* di berbagai daerah serta lokasi atau akses layanan kesehatan dan ARV yang cukup jauh menjadikan

permasalahan akses ARV untuk ODHIV semakin kompleks (Prismasiwi 2020).

Kekosongan dan kesulitan mengakses ARV membuat ODHIV putus obat atau tidak mengonsumsi obat ARV. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan Wiendra Waworuntu mengakui terdapat penurunan konsumsi obat ARV. "Dampak terhadap jumlah pengobatan terhadap HIV/AIDS, tidak semuanya menurun. Ada yang stabil, tapi ada juga yang menurun," ungkap Wiendra pada dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (Yanyan 2017).

BAB III
UPAYA INDONESIA AIDS COALITIONS DALAM MERESPONS
TARGET 90-90-90

Pada bab ini, penulis akan memaparkan terkait aplikasi kerangka pemikiran secara argumentatif dengan dukungan data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, serta akan memaparkan terkait penjelasan bagaimana rumusan masalah dijawab melalui aplikasi kerangka pemikiran. Penulis akan memaparkan terkait upaya Indonesia AIDS *Coalitions* dan kaitannya dengan Target 90-90-90.

3.1 Koalisi yang dibentuk oleh NGO di Indonesia

Proses yang dilakukan dalam pembangunan koalisi antar LSM dapat dilakukan melalui kerja sama kolektif. Dorongan untuk bekerja sama yang dalam hal ini bukan hanya reaksi defensif. Namun, juga strategi proaktif untuk mencapai tujuan bersama. LSM membentuk koalisi sebagai upaya untuk mempengaruhi serta turut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau pembuatan kebijakan (Yanacopulus 2005).

Komunitas harus mulai membangun citra yang baik dan melakukan kerja sama yang menarik, sehingga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Hal ini dapat diawali dengan membangun koalisi antar LSM dengan visi dan misi yang sejalan. Selanjutnya, koalisi antar LSM dapat memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan usia. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan upaya penulisan atau narasi deskriptif yang menceritakan terkait hal-hal baik, upaya, maupun terobosan yang telah dilakukan oleh koalisi LSM. Dengan membangun citra yang baik, tidak menutup kemungkinan bahwa

koalisi LSM akan memiliki peran maupun posisi yang lebih dari sekedar pemberi layanan (Irwandy 2015).

Indonesia *AIDS Coalitions* (IAC) atau Koalisi AIDS Indonesia adalah koalisi yang awalnya dibentuk dari perkumpulan individu dari beberapa LSM yang berbeda. Dalam hal ini mereka yang peduli dengan isu-isu HIV/AIDS serta mereka yang mengalami secara langsung kesulitan dalam mengakses layanan publik. Mulai dari akses untuk layanan kesehatan sampai dengan akses untuk layanan sosial, bahkan bantuan finansial. Hal ini disebabkan karena status kesehatan beberapa dari mereka adalah orang dengan HIV/AIDS (IAC 2020).

Terbentuknya IAC sebagai koalisi berbasis komunitas yang dalam hal ini berkontribusi secara aktif dalam upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia, untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat untuk mendukung program penanggulangan HIV & AIDS melalui kolaborasi serta layanan dengan aktor-aktor baik dari pemerintah maupun masyarakat umum (IAC 2020).

Founder IAC sendiri bernama Aditya Wardhana merupakan aktor yang berasal dari LSM Rumah Cemara, yang mana LSM ini memperjuangkan hak dan perlakuan yang sama bagi pecandu obat-obatan dan orang dengan HIV/AIDS. Sindi Putri merupakan *Advocacy and Policy* IAC yang berasal dari *Solidarity Foundation* LSM yang bergerak untuk kampanye, advokasi, edukasi dan sosialisasi penanggulangan AIDS, akses pengobatan, hak kesehatan dan hak perempuan. Serta Irwandy Widjaja sebagai *Community*

mobilization di IAC sekaligus mewakili salah satu pihak yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan (IAC 2020).

Indonesia *AIDS Coalitions* juga memiliki spesialisasi program prioritas sebagai upaya untuk mempengaruhi serta turut berpartisipasi dalam proses penanggulangan HIV/AIDS, di antaranya yaitu:

- *Access*, dalam hal ini membantu para ODHIV untuk mendapatkan akses obat-obatan (ARV) dan akses untuk layanan kesehatan lainnya. Dalam hal ini, JKN dapat dikatakan sebagai sebuah alat yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan masyarakat dalam upaya atau program kesehatan untuk mencapai keadilan. Dalam konteks akses, JKN harus mampu melihat kebutuhan ODHIV dan kelompok lain yang terdampak HIV/AIDS. Hal ini digunakan untuk memastikan akses yang sama dan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*).
- *Budgeting*, dengan mendorong ketersediaan pendanaan dalam respons penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kesehatan nasional. Dana domestic untuk penanggulangan HIV/AIDS saat ini digunakan untuk menyediakan kebutuhan logistik, utamanya untuk pembelian ARV.
- *Campaign*, dalam hal ini kampanye dilakukan melalui inovasi dan teknologi dari media sosial, karena media sosial merupakan instrumen untuk menyebarkan informasi, edukasi, serta advokasi. Kampanye yang dikelola oleh IAC memiliki tujuan untuk

menyampaikan informasi serta edukasi yang benar dan lengkap dengan tagar ODHA Berhak Sehat (OBS). IAC memiliki inisiasi untuk membuat kampanye OBS karena mereka memiliki keprihatinan atas penyebaran informasi yang tidak benar terkait HIV/AIDS. Bahkan pada saat itu, dirasa sangat sulit memperoleh informasi yang benar terkait HIV/AIDS. Apabila ada, informasi tersebut lebih menjurus ke jurnal ilmiah atau medis yang mana tidak semua kalangan dapat memahaminya dengan baik, bahkan justru dapat mengakibatkan kebingungan bahkan ketakutan untuk orang awam. Kampanye OBS awalnya digunakan sebagai gerakan masif melalui media sosial khususnya Twitter. Oleh karena itu, tujuan awal dari kampanye ini yaitu untuk menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas yang dikemas dengan lebih sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memahami informasi tersebut dengan baik serta tidak menimbulkan ketakutan bagi ODHIV.

- *Law and Human Rights*, dalam hal ini peka terhadap hukum dan hak asasi manusia dapat mendorong lingkungan masyarakat sekitar yang peduli dan berpihak pada ODHIV maupun populasi kunci.
- *Community Mobilization*, dengan memperbaiki citra serta memperkuat mobilisasi komunitas, tentu saja dapat menghasilkan dampak yang baik (IAC 2022).

3.2 Proses Lobi Indonesia AIDS Coalitions

Tabel 1 Aktor, Substansi dan Hasil Lobi

No.	Tanggal dan Aktor Lobi	Substansi Lobi	Hasil Lobi
1	12-15 Juni 2023 (IAC dan KOMNAS HAM) Aktor IAC: Aditya Wardhana, Sindi Putri Aktor KOMNAS HAM: Nurliyanti Ritiana Lande'eo selaku administrasi umum KOMNAS HAM, serta anggota KOMNAS HAM	Lobi terkait perlindungan hak-hak ODHIV agar tidak mengalami diskriminasi dan stigma.	Melindungi hak dasar ODHIV, turut melibatkan populasi kunci dalam pengambilan keputusan terkait HIV/AIDS. Menyebarluaskan informasi yang benar terkait ODHIV agar tidak mendapatkan stigma buruk dan diskriminasi.
2	2 Juli 2021 (IAC, JIP, Kemenkes) Aktor IAC: Aditya Wardhana dan tim Aktor JIP: Meirinda Sebayang selaku Koordinator Nasional yang bergerak untuk Jaringan Indonesia Positif	Lobi terkait vaksin COVID-19 yang harus disegerakan bagi kelompok rentan seperti orang dengan HIV/AIDS.	ODHIV menerima vaksinasi COVID-19.

	Aktor Pemerintah: Kementerian Kesehatan RI.		
3	29 Juni 2020 (IAC dan Dirjen P2P) Aktor IAC: Aditya Wardhana selaku Direktur Eksekutif dan Jaclyn Angelina selaku Staf Perencanaan, dan Daniel Marguari Aktor P2P: dr. Achmad Yurianto, Nurjannah, SKM., M.Kes., sebagai Kasubdit HIV/AIDS dan PIMS, dr. Ann Natallia Umar, sebagai Kasi PIMS, dan Meirinda Sebayang sebagai Ketua TWG HIV.	Audiensi terkait solusi untuk mengatasi permasalahan ODHA dan ODHIV di Indonesia.	Memberikan opsi kepada IAC untuk diberikan layanan komunikasi dan ruang untuk koordinasi. Hal ini ditawarkan supaya IAC mendapatkan umpan balik dari permasalahan yang sedang diangkat. Selain itu Dirjen P2P juga turut berkomitmen kuat dalam mendukung program penanggulangan HIV/AIDS yang juga berpihak pada penerima manfaat, yaitu ODHIV dan populasi kunci.
4	6-10 Juli 2020 (IAC dan <i>International AIDS Conference</i>)	Penurunan harga ARV di Indonesia dan rencana	Terjadi penurunan harga ARV sebesar 48% dari harga yang ditetapkan sebelumnya.

		<p>pengelolaan pasokan stok ARV.</p>	
5	<p>2 Maret 2020 (IAC dan Pemerintah) Aktor IAC: Aditya Wrdhana dan tim Aktor Pemerintah: Kementerian Kesehatan RI</p>	<p>Lobi dengan membawakan kasus kelangkaan ARV di Indonesia karena masih impor dari India dan China.</p>	<p>IAC meminta kementerian kesehatan untuk melakukan kerjaama dengan Ikatan Dokter Indonesia guna mempromosikan (<i>Rationale Use of Medicines</i>) atau penggunaan obat secara rasional untuk menghemat stok ARV yang masih tersedia.</p>
6	<p>23 Oktober 2019 (IAC dan BAPPEDA Kota Semarang) Aktor IAC: Aditya Wardhana dan tim. Aktor BAPPEDA: Bambang Soekrdjo selaku Ketua KPA Kota Semarang, Ibu Yuni Dwi</p>	<p>Kerja sama dalam memperkuat kapasitas LSM dan pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS.</p>	<p>Peruntukan pendanaan APBD dimana 15-25 persen anggaran harus diperuntukkan untuk pemberdayaan.</p>

	Purwani selaku Wakil Forum Sehat Kota Semarang, serta Ibu Dwi Hartani selaku Ketua Bidang Pemerintahan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kota Semarang		
--	---	--	--

Proses Lobi IAC dilakukan dengan cara melakukan lobi kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak solusi untuk mengatasi permasalahan ODHA dan ODHIV di Indonesia dengan cara melakukan audiensi bersama Dirjen P2P pada 29 Juni 2020. Perwakilan dari IAC menyampaikan perannya sebagai komunitas yang turut mendukung pencapaian program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia melalui target 90-90-90. Dalam hal ini Bapak Dirjen memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh IAC. Bapak Dirjen juga memaparkan pendapatnya terkait koordinasi yang kuat antar lembaga juga mendorong program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia supaya lebih berkualitas. Sehingga dalam hal ini, Bapak Dirjen memberikan dukungan yang kuat kepada IAC khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS (IAC 2020).

Namun, dalam hal ini IAC memiliki kekhawatiran yaitu, khawatir apabila dukungan kuat dari Bapak Dirjen tidak sampai kepada pihak atau level paling bawah atau dapat dikatakan tidak merata. Kemudian Bapak Dirjen memberikan tawaran opsi kepada IAC untuk diberikan layanan

komunikasi dan ruang untuk koordinasi. Hal ini ditawarkan supaya IAC mendapatkan umpan balik sesuai dengan kebutuhan atas permasalahan yang diangkat dan informasi lainnya dapat sampai ke pihak dengan level paling bawah. Selanjutnya, Bapak Dirjen menutup pertemuan tersebut dengan komitmen yang kuat untuk mendukung IAC dalam upayanya untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia (IAC 2020).

Melakukan lobi kepada pemerintah untuk memikirkan kembali rencana pengelolaan pasokan stok ARV di Indonesia, karena selama pandemi COVID-19 banyak teman-teman ODHIV yang hanya memiliki stok ARV untuk jangka waktu kurang dari satu bulan. Detail informasi yang didapatkan dari riset yang dilakukan oleh Sebayang, sejumlah 47.6% atau 450 responden hanya memiliki stok ARV untuk jangka waktu kurang dari 1 bulan khususnya di awal pandemi, mereka dapat mengakses layanan ARV untuk sebulan sekali. Riset tersebut diharapkan sebagai bahan kajian dalam advokasi untuk memikirkan kembali rencana pengelolaan pasokan stok ARV di Indonesia serta melakukan penyediaan stok ARV setidaknya untuk 3 sampai dengan 6 bulan, sesuai anjuran WHO. Karena dalam hal ini ODHIV masih mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Selain ketakutan kesulitan mendapatkan ARV, 51% dari mereka juga khawatir terhadap kesehatan diri sendiri, dan 49% untuk kesehatan keluarganya. Di sisi lain, ODHIV juga khawatir terhadap stigma (Sebayang 2019).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perencanaan distribusi dan perencanaan stok ARV pada masa pandemi COVID-19. Perlu adanya fleksibilitas terkait mekanisme penyediaan ARV, misalnya dengan

menggunakan layanan jasa antar serta memberikan dengan jumlah yang cukup untuk persediaan bulan selanjutnya (Sebayang 2019).

Selain itu, IAC juga melakukan upaya untuk penurunan harga ARV di Indonesia. Aditya Wardhana, selaku *founder* dari IAC juga berkesempatan membagikan pengalaman tentang upaya lobi dan negosiasi komunitas untuk penurunan harga ARV di Indonesia, hal ini disampaikan dalam *International AIDS Conference 2020*, yang diadakan pada tanggal 6-10 Juli 2020. IAC yang telah terlibat dalam upaya penurunan ARV ini telah mengadakan berbagai upaya lobi ke pemerintahan yang kemudian dapat mendorong penurunan harga ARV sebesar 48% dari harga sebelumnya. Keberhasilan ini dapat dijadikan sebagai indikasi adanya peningkatan kualitas komunitas dalam lobi maupun advokasi untuk program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia (IAC 2020).

Melakukan lobi untuk bekerja dalam memperkuat kapasitas LSM dan pemangku kepentingan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan cara Indonesia AIDS Coalition bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang berupa pertemuan dengan *stakeholder*, hal ini dilakukan untuk mendorong Anggaran Program Penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan melalui kegiatan Musrenbang tahun 2019 untuk anggaran tahun 2020. Kegiatan kemitraan Pemerintah Kota dengan komunitas ini tentu saja perlu terus ditingkatkan, dalam hal ini Musrenbang dapat menjadi forum yang mewadahi komunitas atau masyarakat untuk memberikan usulan program dari tingkatan paling rendah seperti melalui tahapan tingkat RT/RW,

kelurahan, kecamatan hingga kota. Dari forum inilah akhirnya disepakati untuk diberikan regulasi yang mengatur peruntukan pendanaan APBD yang mana 15-25 persen anggaran diperuntukkan dalam hal pemberdayaan, seperti pemberdayaan untuk ODHA maupun ODHIV. Komitmen dari pemerintah, akan memiliki fokus terhadap program pemberdayaan masyarakat yang akan disambungkan melalui Kepala Seksi Sosial pada kewilayahan. Selain itu, mereka juga dapat secara khusus mengajukan proposal untuk program penanggulangan HIV/AIDS (IAC 2019).

Lobi terkait perlindungan hak-hak ODHIV agar tidak mengalami diskriminasi dan stigma yang dilakukan oleh IAC dan KOMNAS HAM pada 2-15 Juni 2023 dengan hasil lobi KOMNAS HAM akan turut melibatkan populasi kunci dalam pengambilan keputusan terkait HIV/AIDS. Menyebarkan informasi yang benar terkait ODHIV agar tidak mendapatkan stigma buruk dan diskriminasi (IAC 2023).

Lobi terkait vaksin COVID-19 pada 2 Juli 2021 yang dilakukan antara IAC, JIP, Kemenkes dengan substansi lobi terkait vaksin yang harus disegerakan bagi kelompok rentan seperti orang dengan HIV/AIDS (IAC 2021)

Proses lobi yang dilakukan oleh IAC menunjukkan bahwa kebijakan memiliki hubungan yang kuat dengan proses lobi kepada *stakeholder*. Proses lobi ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk merespons target 90-90-90 karena target tersebut akan sulit tercapai apabila terdapat suatu masalah dan kebijakan kurang mendukung atau tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan ARV

untuk ODHIV tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak pandemi COVID-19 untuk ODHIV melibatkan pembuat kebijakan dengan memberi rekomendasi serta informasi berbasis bukti untuk berkolaborasi dengan pemerintah (IAC 2020).

Kesimpulannya, IAC berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai upaya untuk merespons target 90-90-90 selama pandemi COVID-19.

3.3 Proses Kampanye Indonesia AIDS Coalitions

Awalnya, kampanye yang diinisiasi oleh IAC dengan tagar #ODHABerhakSehat ini pertama kali berlangsung di Jakarta pada 28 Desember 2014. Saat itu, kampanye dilakukan untuk memberikan semangat ODHIV serta memberikan edukasi melalui twitter dan dilanjutkan turun ke jalan untuk membuktikan bahwa berjabat tangan dan berpelukan dengan ODHIV tidak akan menularkan virus HIV. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kampanye ini terus berlangsung hingga saat ini. Tujuan utama dari kampanye OBS adalah memberikan informasi terkait isu HIV lewat media sosial untuk meningkatkan pengetahuan mengenai HIV, menormalisasi tes HIV untuk mendorong capaian tes HIV, dan mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHIV dan populasi kunci (IAC 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu, kampanye digunakan sebagai salah satu bentuk upaya IAC dalam merespons target 90-90-90 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. IAC pun memiliki strategi tersendiri dalam melakukan kampanye, strategi yang dimaksud yaitu *downstream strategy* dan *upstream strategy*. Dalam hal ini *downstream strategy*, merupakan strategi

yang digunakan oleh IAC untuk komunikasi sosial, menyebarkan informasi dengan menjadikan masyarakat sebagai target kampanye. Sedangkan *upstream strategy* merupakan strategi yang digunakan melalui komunikasi pemasaran sosial sebagai upaya IAC untuk mempengaruhi kebijakan dengan memperluas dukungan serta menyebarluaskan isu atau persoalan tertentu yang berkaitan dengan HIV/AIDS (Suwarso 2020).

Kampanye OBS menjadikan *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai wadah atau saluran dalam melakukan kampanye. Di era yang sudah serba digital ini, media sosial diharapkan dapat mengekspansi informasi yang disebarkan sehingga sampai kepada berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat, karena media sosial dapat merubah cara orang dalam mengomunikasikan sebuah gagasan, media sosial juga dapat menggeser penyebaran informasi *one to many* menjadi *many to many* (Wicaksono 2013).

Dalam konteks layanan kesehatan publik, menurut Hughes (2008) media sosial merupakan saluran komunikasi yang dapat dijadikan atau diintegrasikan untuk kampanye. Dalam hal ini, mencakup seluruh aktivitas kampanye yang menggabungkan antara teknologi serta interaksi sosial (Alden 2011).

Kampanye OBS juga menjalin kemitraan dengan beberapa dokter untuk menjawab pertanyaan seputar medis. Namun, memang kemitraan tersebut tidak terikat dengan kontrak atau perjanjian tertulis lainnya. Kemitraan yang dilakukan dilandasi oleh kesadaran terkait isu HIV/AIDS adalah permasalahan sosial sekaligus epidemi yang membutuhkan perhatian

banyak pihak. Strategi yang dilakukan dalam kampanye OBS (upstream strategy) dilakukan dengan penyebaran informasi sebagai upaya mempengaruhi kebijakan, hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dukungan melalui media sosial serta menyebarluaskan isu atau persoalan tertentu yang berkaitan dengan HIV/AIDS. *Upstream strategy* dalam pemasaran sosial sebenarnya adalah upaya advokasi kebijakan. Kampanye dalam advokasi kebijakan juga ditujukan untuk menciptakan atau mengubah persepsi dan membangun dukungan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Melalui *upstream and downstream strategy* diharapkan dapat membantu memperjuangkan isu-isu yang diangkat oleh IAC, selain itu juga diharapkan semakin banyak pihak-pihak yang turut memberikan dukungan, baik dukungan masyarakat maupun dukungan dari pembuat kebijakan (Suwarso 2020).

Kampanye OBS juga sekaligus menekankan pada target 90-90-90 yaitu pada peran strategis pengobatan sebagai pencegahan HIV dengan mengupayakan 90% ODHA mengetahui status HIV-nya, 90% dari mereka kemudian memulai pengobatan dan 90% diantaranya kemudian mencapai supresi jumlah virus dalam cairan tubuh atau supresi virus (Suwarso 2020).

Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai HIV dapat menjadi penyebab awal terjadinya stigma dan diskriminasi di masyarakat luas. Sehingga dapat dilakukan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait HIV melalui kampanye. Sangat penting melibatkan masyarakat dalam upaya mengatasi stigma dan diskriminasi. Masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengurangi stigma dan

diskriminasi. IAC berencana untuk meluncurkan kampanye media yang komprehensif demi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait dengan HIV, pencegahan, tes, dan layanan pendukung terkait (Suwarso 2020).

Output yang dihasilkan dari kampanye OBS adalah adanya konten mengenai informasi HIV yang menarik dan dipublikasi di media sosial, adanya konten *visual feed* yang menarik mengenai upaya penyebaran informasi (Suwarso 2020).

Alur penyebaran informasi yang lebih masif dengan memanfaatkan media sosial yang lebih tersistem akan membantu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Potensi media sosial sangat besar mengingat hampir semua orang di Indonesia saat ini mengakses sosial media melalui berbagai platform. Penggunaan media sosial untuk kampanye isu HIV yang digunakan seperti twitter, facebook dan instagram. strategi digital marketing yang sistematis dan terencana untuk bisa mengoptimalkan media sosial sebagai salah satu saluran kampanye (IAC 2020).

NGO Coalitions dapat menjangkau dan melibatkan orang-orang yang paling terpengaruh oleh terbatasnya ketersediaan terapi antiretroviral selama pandemi COVID-19. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan kemitraan masyarakat. Kampanye OBS ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, juga dapat mempromosikan pengorganisasian masyarakat sebagai suatu proses di mana orang berkumpul untuk mengidentifikasi masalah atau tujuan bersama, memobilisasi sumber daya, dan mengembangkan serta menerapkan strategi

untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Ini mungkin melibatkan pengorganisasian koalisi yang menyatukan orang dan organisasi dari seluruh komunitas untuk bekerja pada isu-isu tertentu (Suwarso 2020).

Kesimpulannya, IAC dapat memobilisasi masyarakat lokal dengan berbagai cara untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan terapi antiretroviral selama pandemi COVID-19. Ini termasuk melibatkan anggota masyarakat, mempromosikan pengorganisasian masyarakat, membangun kapasitas LSM, dan memberikan upaya-upaya peningkatan kesadaran dan advokasi.

Gambar 1.4 Kampanye ODHA Berhak Sehat

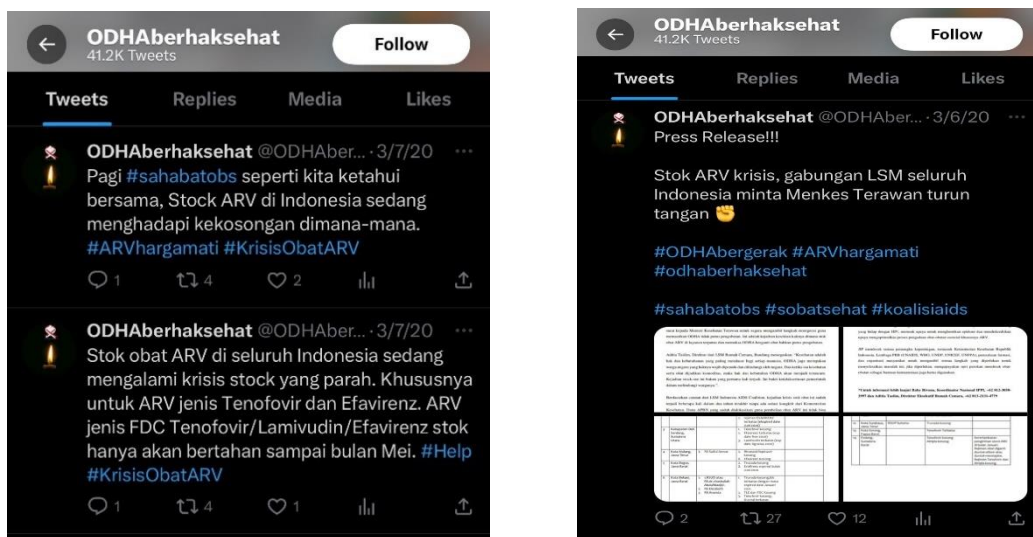


Sumber: Facebook ODHA Berhak Sehat

Kampanye ini dilakukan di Jakarta pada 28 Desember 2014 yang mana ini merupakan awal mula kampanye diinisiasi oleh Indonesia AIDS *Coalitions*. Pada kampanye yang dilakukan di Jakarta saat acara *Car Free Day* tersebut, diikuti oleh 150 orang yang memberikan dukungan serta semangat kepada Orang Dengan HIV & AIDS. Kampanye ini juga dilakukan untuk membuka mata masyarakat bahwa sebetulnya berjabat tangan dan berpelukan dengan ODHIV tidak akan menularkan virus HIV. Banyak opini serta hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat awam terkait sistem penularan virus HIV sehingga masih banyak masyarakat yang

tidak mau berteman dekat dengan orang-orang yang memiliki status HIV positif. Faktanya berpelukan, berjabat tangan, berenang bersama, memakai alat makan yang sama, serta gigitan nyamuk tidak akan menularkan virus HIV. Sebetulnya virus HIV hanya akan menular melalui cairan darah, cairan reproduksi, dan air susu ibu (IAC 2014).

Gambar 1.5 Kampanye OBS Twitter

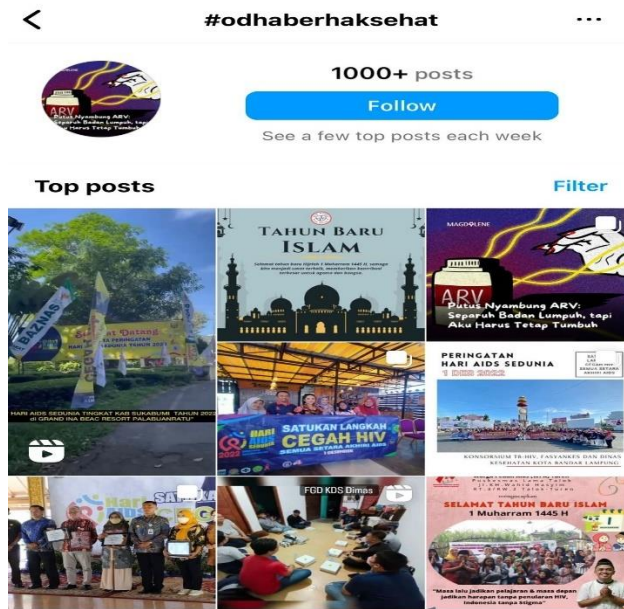


Sumber: Twitter ODHA Berhak Sehat

Kampanye yang dilakukan melalui media twitter terkait terbatasnya ARV di masa pandemic COVID-19 di Indonesia mulai diupload pada 3 Juni 2020. Awalnya disebabkan karena stok ARV yang krisis, IAC bersama gabungan Jaringan Indonesia Positif seluruh Indonesia mengeluarkan press release yang meminta Menteri Kesehatan, Terawan turun tangan. Selain itu, akun twitter dengan tagar #ODHABerhakSehat ini juga terus mengunggah keresahan terkait stok ARV yang terus mengalami kekosongan, padahal ARV merupakan obat yang harus

dikonsumsi oleh ODHIV setiap hari dan selamanya. Sehingga apabila ODHIV tidak mengonsumsi ARV maka akan berakibat fatal (IAC 2020).

Gambar 1.6 Kampanye OBS Instagram



Sumber: Instagram ODHA Berhak Sehat

Kampanye ODHA Berhak Sehat yang dilakukan melalui media Instagram ini dimulai sejak 1 Juli 2021, focus utama kampanye melalui media Instagram ini adalah edukasi terkait HIV & AIDS. Selain melakukan kampanye dengan mengunggah postingan menarik di feeds Instagram, juga dilakukan melalui live streaming dengan mengundang narasumber (IAC 2021).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan IAC untuk merespons target 90-90-90 untuk orang dengan HIV/AIDS tahun 2011 hingga 2023 melalui tiga upaya, yaitu membentuk koalisi LSM dengan nama Indonesia AIDS Coalitions yang berdiri sejak tahun 2011, koalisi ini didirikan atas dasar beberapa aktivis yang memiliki keprihatinan serta mengalami secara langsung kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kondisi tersebut yang akhirnya membuat para aktivis sosial tergerak untuk mendirikan IAC guna membentuk *power* yang lebih kuat.

Lobi, dengan cara melakukan negosiasi untuk kepentingan, dalam hal ini proses yang dilakukan saat melobi pemerintah, melakukan pertemuan dengan *stakeholder* untuk mencapai kepentingan, hingga akhirnya mencapai target yang diinginkan untuk membantu menanggulangi permasalahan HIV/AIDS di Indonesia dan membantu target 90-90-90 di Indonesia.

Kampanye ODHA Berhak Sehat, berisi tentang pesan serta tujuan yang jelas, tujuan kampanye yaitu untuk menyebarkan informasi, edukasi, serta memperoleh dukungan dengan menggunakan *platform* seperti facebook, twitter, dan instagram untuk menyebarluaskan informasi. Kampanye merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh koalisi. Khususnya kampanye OBS yang dilakukan oleh Indonesia AIDS *Coalitions*.

IAC dalam upayanya untuk merespons target 90-90-90 adalah untuk memastikan bahwa orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia mengetahui status HIVnya, dilanjutkan dengan terus memiliki akses terhadap terapi antiretroviral, dan ARV on supresi virus hingga akhirnya didapatkan jumlah viraload nol. Penting untuk terus melindungi dan memajukan hak dasar ODHIV, memastikan akses ke layanan pencegahan, pengobatan, perawatan, dukungan, dan mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan. IAC telah bekerjasama dengan pemerintah, KOMNAS HAM, serta pemerhati HIV/AIDS yang lain untuk membantu suksesnya target 90-90-90 di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa IAC telah berupaya untuk merespons target 90-90-90 pada pandemi COVID-19. Indonesia AIDS *Coalitions* yang dalam hal ini berperan penting dalam proses pembentukan koalisi, proses lobi, dan kampanye untuk merespons target 90-90-90 di Indonesia.

Tabel 2 Indikator *NGO Coalitions* dan Implementasinya

No	Indikator <i>NGO Coalitions</i>	Implementasi
1	Koalisi NGO	Koalisi NGO dengan nama Indonesia AIDS <i>Coalitions</i> dibentuk dengan pembangunan koalisi antar LSM yang memiliki dorongan untuk bekerja sama sebagai upaya untuk mempengaruhi serta turut berpartisipasi dalam proses

		pembangunan atau pembuatan kebijakan.
2	Lobi	<p>Melakukan lobi kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak solusi untuk mengatasi permasalahan ODHA dan ODHIV di Indonesia dengan cara melakukan audiensi bersama Dirjen P2P.</p> <p>Melakukan lobi kepada pemerintah untuk memikirkan kembali rencana pengelolaan pasokan stok ARV di Indonesia. Dalam hal ini, IAC juga melakukan upaya untuk penurunan harga ARV di Indonesia.</p> <p>Melakukan lobi untuk bekerja dalam memperkuat kapasitas LSM dan pemangku kepentingan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.</p> <p>Lobi terkait perlindungan hak-hak ODHIV agar tidak mengalami diskriminasi dan stigma.</p> <p>Lobi terkait vaksin COVID-19 yang harus disegerakan bagi kelompok</p>

		rentan seperti orang dengan HIV/AIDS.
3	Kampanye	Melakukan kampanye OBS (ODHA Berhak Sehat) dengan memanfaatkan media sosial seperti twitter, facebook, dan Instagram untuk menyebarluaskan informasi, edukasi, serta untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian target 90-90-90 di Indonesia. Kampanye ini dimulai sejak tahun 2014. Kampanye melalui Instagram dimulai sejak 1 Juli 2021, twitter terkait kekosongan ARV mulai disuarakan pada 3 Juni 2020.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada Indonesia *AIDS Coalitions* dalam merespons target 90-90-90 untuk orang dengan HIV/AIDS di Indonesia, oleh karena itu untuk peneliti yang akan melakukan riset dengan topik yang sama, peneliti merekomendasikan untuk meneliti lebih jauh terkait ketersediaan ARV dan pengaruhnya terhadap *health security* ODHA dan ODHIV di Indonesia atau negara lain.

Selain itu, penulis juga merekomendasikan agar peneliti selanjutnya melihat dari pandangan komunitas yang terlibat dalam penjangkauan dan

pendampingan serta pengembangan sistem yang dilakukan, hal ini dilakukan untuk memetakan komunitas sesuai dengan perannya, misalnya sebagai penjangkau atau pendamping. Perlu dilakukan riset terkait metode penyebaran informasi yang lebih masif, tersistem dan terstruktur yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial melalui untuk mendorong munculnya permintaan yang tinggi untuk layanan terkait HIV/AIDS dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. 2022. "Peran UNAIDS di Indonesia terhadap Penanggulangan HIV-AIDS di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." *Jurnal Universitas Nasional*. <http://repository.unas.ac.id/5554/6/BAB%205.pdf>.
- Alden, Sara, L. 2011. "The Roles of Social Media in Public Health Marketing." https://cdr.lib.unc.edu/concern/masters_papers/0z709099v.
- Batam, Perumahan, Jl Batam, Raya No, Pasir Gunung Selatan, dan Kelapa Dua. 2019. *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional MELVANA MEDIA*. www.melvanamedia.com.
- CNN. 2019. "Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201220070650-106->
- Farmalkes, Setditjen . 2018. "Ketersediaan ARV. Jakarta: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat", Kementerian Kesehatan RI.
- Handayani, Sarah. 2018. "Strategi Penanggulangan HIV & AIDS." *Medical and Health Science Journal*, Vol. 1, No. 1: 4–6.
- IAC. 2013. "Sejarah dan Visi Misi *Indonesia AIDS Coalitions*." <https://www.iac.or.id/en/>.
- IAC. 2014. "Kampanye ODHA Berhak Sehat Jakarta." <https://m.facebook.com/odhaberhaksehatorg>.
- IAC. 2019. "Stok obat ARV semakin menipis, Indonesia dalam kondisi darurat AIDS." <https://www.iac.or.id/id/stok-obat-arv-semakin-menipis-indonesia-dalam-kondisi-darurat-aids/>.
- IAC. 2020. "Upaya Advokasi Komunitas bagi Penurunan Harga Obat ARV di Indonesia." <https://www.iac.or.id/id/upaya-advokasi-komunitas-bagi-penurunan-harga-obat-arv-di-indonesia/>.
- IAC. 2021. "Kampanye IAC melalui Media Instagram" <https://instagram.com/odhaberhaksehat> .
- IAC. 2022. "Spesialisasi Program *Indonesia AIDS Coalitions*." <https://www.iac.or.id/en/>.
- IAC. 2023. "Perlindungan Hak ODHIV." <https://www.iac.or.id/en/>.
- Infodatin. 2016. "Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia", Pusdatin, Kementerian Kesehatan
- Infodatin. 2018. "Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV", Pusdatin, Kementerian Kesehatan
- Kartika Sari, Yeni, Thatit Nurmawati, dan Aprilia Putri Hidayat. 2019. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien HIV-AIDS Dalam Terapi Antiretroviral (ARV)." Vol. 7.

- Kemenkes RI. 2015. “Berita Negara Republik Indonesia.” www.peraturan.go.id.
- Kemenkes RI. 2018. “Laporan Situasi Perkembangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, Triwulan IV Tahun 2018.”
- Kemenkes RI. 2019. “Pusat Data dan Informasi KEMENKES RI 2020 HIV & AIDS.”
- Infodatin. 2020. *Laporan Perkembangan HIV-AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)*. Jakarta.
https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_I_2021_FINAL.pdf.
- Kemenkes RI. 2021. “Laporan TW I Kemenkes 2021.”
- Kementerian Kesehatan. 2020. *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*.
<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/info-datin-hiv-dan-aids-2020>.
- Kusumowardoyo, Chrysant. 2015. “Tinjauan Respon Sektor Komunitas terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.”
<https://www.kebijakanidsindonesia.net/id/hasil-penelitian/1375-tinjauan-respon-sektor-komunitas-terhadap-penanggulangan-hiv-dan-aids-di-indonesia>.
- Laporan Situasi Perkembangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, Triwulan IV Tahun 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2018
- Laporan Situasi Perkembangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, Triwulan III Tahun 2019. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2019
- Laporan Situasi Perkembangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, Triwulan IV Tahun 2019. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2020
- Manopo, Febby Regina Rista. 2019. “Upaya United Nations Programme On Aids (Unaid) Dalam Mengakhiri Epidem HIV/AIDS di Indonesia Melalui Fast Track Strategy Tahun 2015-2018.” <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1917/>.
- Najib, Abdul. 2016. “Pola Kebijakan Penanggulangan HIV & AIDS.” *Jurnal Kesehatan Epidemi HIV & AIDS* 9–11.
- Penelitian, Laporan. t.t. “Tinjauan Respon Sektor Komunitas terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.”
- Purba, Prihardani Ganda Tuah. 2020. *Suramnya Nasib Pengidap HIV di Tengah Pandemi*. Jakarta: DW Global Media Forum. <https://www.dw.com/id/suramnya-nasib-pengidap-hiv-di-tengah-pandemi-covid-19/a-54102044>.
- Purwaningsih, Sri Purwati, dan Widayatun. 2008. “Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia.”
- Rianah, Indah. 2016. “Kerjasama USAID dan Kenya dalam Menangani Permasalahan HIV/AIDS di Kenya Melalui PEPFAR.”
- Rondonuwu, Maxi. 2022. “LAPORAN EKSEKUTIF PERKEMBANGAN HIV AIDS DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL (PIMS).”
https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf.
- Safutra, Ilham. 2021. “Kasus Baru HIV di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik.”
<https://www.jawapos.com/kesehatan/01357286/kasus-baru-hiv-di-indonesia-tertinggi-di-asiapasifik>.

- Sara Alden. 2011. "The Roles of Social Media in Public Health Marketing." <https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:8911658a-8b8b-4cac-9d65-47cb3195b4e9>.
- Setyani, Rizka Ayu. 2021. "Dilematis Penanggulangan HIV AIDS Selama Pandemi COVID-19 : Akankah Three Zero 2030 Terwujud?" *Jurnal Kesehatan Masyarakat UNS*. <https://pasca.uns.ac.id/s3ikm/2021/06/05/dilematis-penanggulangan-hiv-aids-selama-pandemi-covid-19-akankah-three-zero-2030-terwujud/>.
- Soedirham, Oedojo, Departemen Promosi Kesehatan, Dan Ilmu, Perilaku Fakultas, dan Kesehatan Masyarakat. 2007a. "Dipresentasikan pada Pertemuan Nasional HIV/AIDS ke 3, tanggal 5-7 Februari."
- Soedirham, Oedojo. 2007. "HIV AIDS Sebagai Isu Human Security." <http://journal.unair.ac.id>.
- Infodatin. 2007. "Pertemuan Nasional HIV/AIDS."
- Sunarti, Sri, dan Purwaningsih • Dan Widayatun. 2008. "Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografis." [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/170-469-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/170-469-1-SM%20(4).pdf).
- Suwarso, Widha Anistya. 2019. "Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial oleh Organisasi Non Profit." <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JEP/index>.
- UNAIDS. 2020. "Global HIV & AIDS statistics." <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>.
- Wardhana, Aditya. 2020. "Audiensi Komunitas dengan Dirjen P2P." <https://www.iac.or.id/id/audiensi-komunitas-dengan-dirjen-p2p/>.
- Waworuntu, Wiendra, M Kes, Direktur P2pml, Jenderal P2p, dan Kementerian Kesehatan. 2020. "KEBIJAKAN DAN PROTOKOL KETERSEDIAAN ARV (masa COVID-19 di Indonesia)."
- Wina. 2019. "KEBIJAKAN DAN PROTOKOL KETERSEDIAAN ARV (masa COVID-19 di Indonesia)."
- WHO. 2019a. "Global Summary Web, World Health Organization." Global Summary Web, World Health Organization.
- Winanta. 2019. *Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak*. Jakarta: Global Summary Web.
- Yanacopulos, Helen. 2005. "The strategies that bind: NGO coalitions and their influence." *Global Networks*. Vol. 5.
- Yanyan, Mochamad. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- amfar.org, "HIV in Asia", <https://www.amfar.org/hiv-in-asia/>, diakses pada 2 Februari 2022